

ANALISIS PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA TARAKAN

ANALYSIS OF EMPLOYMENT PLANNING IN THE CITY OF TARAKAN

Ariani

Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan
ariyanitinsee@gmail.com

Abstrak : Paradigma tradisional memiliki pandangan tentang pembangunan yang ada di Indonesia sebagai negara yang berkembang, sehingga diidentikan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan per-kapita atau dengan strategi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah-masalah pembangunan yang berdasarkan pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Berdasarkan identifikasi perencanaan ketenagakerjaan di kota Tarakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan industri daerah yang mampu menopang ketersediaan kesempatan lapangan kerja di Kota Tarakan, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dari segala aspek, ketesediaan kelembagaan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menopang peningkatan kinerja dari pencari pekerjaan. Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat dinas/instansi, lembaga dan swasta terkait ketenagakerjaan sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kota Tarakan. Responsif, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kota Tarakan. Partisipatif, keterlibatan masyarakat Kota Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat. Akuntabel, Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kota Tarakan dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Melalui beberapa daya dukung sesuai analisis peran yang ada yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, Dukungan kongkrit dan nyata adalah keikutsertaan masyarakat yang terbentuk dalam Tripartit di kota Tarakan. Kedua, Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan kongkrit dan nyata sudah ada dahulu. Ketiga, dukungan dari sektor formal dan informal serta dukungan dari masyarakat yang terdapat di kota Tarakan.

Kata Kunci : Paradigma Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, *Perencanaan Ketenagakerjaan*

Abstract : The traditional paradigm has a view of development that exists in Indonesia as a developing country, so it is identified with efforts to increase per-capita income or with economic growth strategies to reduce development problems based on Pancasila and the opening of the 1945 Constitution. Based on

the identification of planning Employment opportunities in Tarakan City, this study aims to determine the potential and regional industries that are able to support the availability of job opportunities in Tarakan City, the availability of qualified human resources from all aspects, the availability of employment institutions which are expected to be able to support the performance improvement of job seekers. Transparent, the decision-making processes and mechanisms that have been built since the level of service/agencies, institutions and the private sector related to manpower are known and can be monitored by the people of the City of Tarakan. Responsive, the proposed activities are more due to efforts to respond to what are the issues in the people of Tarakan City. Participatory, the involvement of the people of Tarakan City is a necessity in the sense that the formulation is carried out together and always pays attention to the problems/issues raised by the community. Accountable, The whole process is carried out in a transparent manner, answering the needs and involving the people of the City of Tarakan and the results must be accountable. Through several carrying capacities according to the existing role analysis, there are several things that need to be done. First, the concrete and tangible support is the participation of the community formed in the Tripartite in the city of Tarakan. Second, the carrying capacity which is potential (will exist or can be cultivated) also does not exist because this support arises if there is support in the form of concrete and real support that already exists. Third, support from the formal and informal sectors as well as support from the community in the city of Tarakan.

Keywords: *Development Paradigm, Economic Growth, Employment Planning*

PENDAHULUAN

Kita sering berbicara tentang pembangunan, namun mungkin hanya sedikit yang kita ketahui tentang pembangunan itu sendiri. Pembangunan telah menjadi obsesi banyak negara, namun dalam faktanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan banyaknya persoalan yang terjadi selama proses pembangunan yang tidak terselesaikan secara sempurna, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, urbanisasi yang tinggi sehingga menciptakan masyarakat

misikin di kota dan kesenjangan ekonomi.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada paradigma rule government (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada pendekatan legalitas. Penggunaan paradigma rule government atau pendekatan

legalitas, dewasa ini cenderung mengedepankan prosedur, hak dan kewenangan atas urusan yang dimiliki (kepentingan pemerintah daerah), dan kurang memperhatikan prosesnya. Pengertiannya, dalam proses merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan, kurang optimal melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun masyarakat).

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat ini diharapkan pendapatan masyarakat akan turut

meningkat. Pendapatan perkapita yang tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional.

Indikator perubahan pembangunan terjadi akibat dari perubahan pola pikir dari para ekonom dan sebagai tuntutan perubahan zaman dalam visi 2025. Perubahan paradigma pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpedoman pada tingkat GNP sebagai sasaran pembangunan tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas pembangunan, pada saat inilah mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dari rencana pembangunan. Pandangan dari ekonom mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara berkembang dikenal dengan istilah ekonomi pembangunan yang masuk dalam analisis makro ekonomi. Para ekonom menyadari pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik.

Pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan

energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur secara berkelanjutan (*sustainable development*), dan sesuai asas berkeadilan (*growth with distribution*). Pembangunan ekonomi Indonesia harus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa agar keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. Selain itu, didalam proses pembangunan akan dituntut semakin besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) di semua aspek pembangunan ekonomi. Untuk menunjang visi 2025 Pemerintah Indonesia juga meningkatkan peran pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran global yang berperan sebagai standar ukuran pembangunan (*basic need development*).

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat di daerah-daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Demikian pula sebaliknya, pembangunan nasional akan mengundang dampak positif terhadap pembangunan di daerah-daerah, dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu aspek pembangunan daerah adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan antara lain; meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, baik melalui indikator PDRB maupun indikator tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu diprioritaskan sektor-sektor ekonomi yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan perubahan struktur ekonomi di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Oleh karena itu, maka perlu diketahui bagaimana transformasi struktural dalam pembentukan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, dan sektor apa yang menjadi basis dan non basis.

Kota Tarakan merupakan salah satu kota di Kalimantan Utara yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah Kota Tarakan giat memacu pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pemerintah kota adalah mewujudkan Kota Tarakan sebagai salah satu "*Little Singapore*". Sebagai daerah yang wilayah daratannya hanya 38,15 persen dari luas keseluruhan, Kota Tarakan merupakan daerah yang mempunyai prospek cukup cerah untuk menarik

calon investor. Bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utarar telah menetapkan Kota Tarakan sebagai *Marketing Point* bagi pemasaran produk-produk unggulan di wilayah Kaltara yang berbatasan dengan negeri jiran.

Struktur ekonomi Kota Tarakan di tahun 2017 baik dengan migas sebesar 27,90 triliun maupun tanpa migas sebesar 27,05 triliun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya mengalami fluktuasi yang sangat kecil. Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 21,17 persen (angka ini meningkat dari 20,21 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,48 persen (meningkat dari 14,92 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,27 persen (meningkat dari

12,27 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,68 persen (turun dari 12,96 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,23 persen (BPS Kota Tarakan, 2017).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 19,07 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,77 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi maupun jalan lingkungan di hampir seluruh wilayah Kota Tarakan.

PERSEPSI TEORI

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang

dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat:2013). Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011:9).

Indikator Ekonomi dalam pembangunan ekonomi yaitu GNP (*Gross National Product*) atau Produk Nasional Bruto, Kesejahteraan Penduduk, dan Tenaga Kerja dan Pengangguran. Indikator pertama yang umum digunakan diberbagai Negara untuk menilai perkembangan ekonomi adalah perubahan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu panjang. Pendapatan nasional riil menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional riil-nya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

Indikator kedua yang juga digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi adalah nilai kesejahteraan penduduknya. Terjadi peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang. Hal ini dapat ditinjau dari

kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi yang lancar menunjukkan distribusi pendapatan per kapita pada seluruh wilayah Negara. Peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata pada seluruh kawasan. Tingkat kesejahteraan dapat pula diukur dengan pendapatan riil per kapita.

Indikator ketiga yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.

Selain indikator ekonomi terdapat pula Indikator Non Ekonomi (Sosial) antara lain Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Dimana Indeks kualitas hidup (IKH) atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.

Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap

yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. (Sukirno, 2008)

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2014), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Waterston (dalam Conyers 1994;4) Perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.”. Selain proses yang sistematis dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif perencanaan didalamnya terdapat cara pencapaian tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif.

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Keegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan

utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Transformasi struktural ekonomi dalam Todaro (2011) merupakan proses transformasi perekonomian sedemikian rupa sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional akhirnya melampaui kontribusi sektor pertanian. Pemahaman tentang perubahan struktur perekonomian memerlukan pemahaman konsep-konsep sektor primer, sekunder dan tersier serta perbedaannya. Perubahan struktur yang terjadi dapat meliputi proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern.

Transformasi struktural merupakan suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pemahaman pergeseran struktur ekonomi di Indonesia dimana menurut Kuznet, sektor ekonomi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pertanian, kegiatan yang termasuk didalamnya bidang pertanian, perburuan, perikanan dan kehutanan.
2. Industri, kegiatan yang termasuk didalamnya bidang pertambangan, industri pengolahan, industri tenaga (air dan listrik), perhubungan serta pengangkutan.
3. Jasa-jasa, yaitu kegiatan yang termasuk didalamnya bidang perdagangan, keuangan, jasa perseorangan, dan jasa-jasa lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan,. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : “Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”.

Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2003:16) ” usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki .

Diana Conyers (1994;154) ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

ZOPP adalah metode perencanaan proyek yang dikembangkan oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dan digunakan untuk perencanaan proyek-proyek kerja sama teknis Republik Federal Jerman dengan negara-negara mitra. ZOPP adalah seperangkat alat-alat perencanaan yang digunakan secara bertahap mulai dari Analisis Keadaan hingga Rancangan Proyek.

Alat ZOPP yang digunakan pada penelitian ini yaitu Analisis Keadaan, dimana proses yang dilakukan antara lain :

1. *Analisis Permasalahan.* Menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.
2. *Analisis Tujuan.* Meneliti tujuan - tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut.
3. *Analisis Alternatif.* Menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil.
4. *Analisis Peran.* Menyidik pihak-pihak (lembaga, kelompok masyarakat dsb.) yang terkait dengan proyek dan mengkaji kepentingan dan potensinya.

Ciri-ciri utama dalam penerapan ZOPP adalah :

1. Kerja Kelompok (Teamwork). Perencanaan dilaksanakan oleh, sedapat mungkin, semua pihak yang terkait dengan proyek
2. Peragaan. Setiap tahap dalam perencanaan direkam secara serentak & lengkap pada papan (pinboard) atau lembar kertas ukuran besar (flipchart) agar semua peserta selalu mengetahui perkembangan perencanaan secara jelas
3. Moderasi (Fasilitasi). Kerja sama dalam perencanaan diperlancar oleh orang-orang yang tidak terkait dengan proyek (fasilitator). Mereka membantu pula untuk mencapai
 1. Perencanaan partisipatif melalui metode ZOOP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa.
 1. Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan.
 2. Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut.
 3. Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil.
 4. Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok masyarakat, dan sebagainya) yang terkait dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian difokuskan pada daerah Kota Tarakan sebagai komponen pertumbuhan wilayah (Regional) dan Provinsi Kalimantan Utara sebagai komponen pertumbuhan acuan (provinsi).

Pengumpulan data penelitian, lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder yang berupa data-data, dokumen, laporan dan informasi yang telah ada sebelumnya baik berupa data umum dan data khusus. Selain itu juga menggunakan data primer dengan melakukan wawancara untuk melihat dan menentukan kebijakan yang dapat diambil guna perkembangan wilayah.

Institusi yang menjadi sumber pengumpulan data meliputi: Kantor Bappeda Tarakan, Kantor BPS Tarakan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Geografi dan iklim kota Tarakan terakhir menurut BPS 2020



Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020

Secara astronomis, Kota Tarakan terletak antara 3°.14'30"–3°.26'37" Lintang Utara dan 117°.30'50"–117°.40'12" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tarakan memiliki batasbatas: Utara – Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung; Selatan – Kabupaten Bulungan; Barat – Kabupaten Bulungan; Timur –Laut Sulawesi. Kota Tarakan terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Tarakan Timur : Kelurahan Mamburungan, Mamburungan Timur, Pantai Amal, Kampung Enam, Kampung Empat, Gunung Lingkas, dan Lingkas Ujung.
2. Kecamatan Tarakan Tengah : Kelurahan Selumit Pantai, Selumit, Sebengkok, Pamusian, dan Kampung Satu Skip.
3. Kecamatan Tarakan Barat : Kelurahan Karang Rejo, Karang Balik, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, dan Karang Harapan.
4. Kecamatan Tarakan Utara : Kelurahan Juata Permai, Juata Kerikil, dan Juata Laut.

Tabel 3.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2015-2019
Table 3.1.3 Population by Subdistrict in Tarakan Municipality, 2015-2019

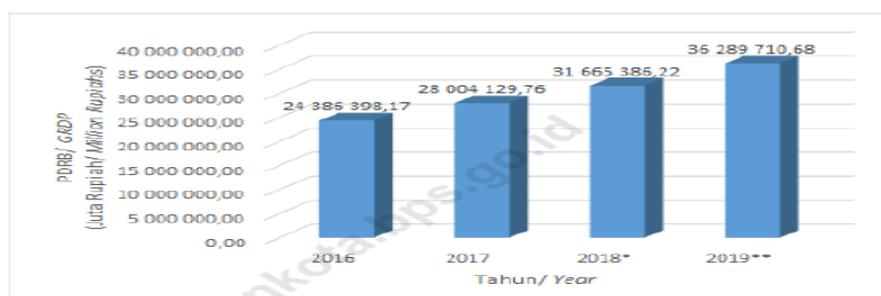
Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tarakan Timur	52 353	54 269	56 233	58 233	60 203
Tarakan Tengah	73 836	76 538	79 312	82 135	84 918
Tarakan Barat	82 528	85 547	88 642	91 792	94 898
Tarakan Utara	26 848	27 831	28 839	29 865	30 875
Tarakan	235 565	244 185	253 026	262 025	270 894

Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Kecamatan Kota Tarakan, 2015-2019 dapat dilihat pertumbuhan penduduk di Kota Tarakan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk dari

setiap Kecamatan yang ada di Kota Tarakan. Peningkatan jumlah penduduk juga terlihat terjadi persebaran jumlah penduduk dari setiap kecamatan yang ada.

Gambar 8.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan (juta rupiah), 2016–2019
Figures 8.2 Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Tarakan Municipality (million rupiahs), 2016–2019



Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020

Dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi kota Tarakan serta peningkatan struktur ekonomi kota Tarakan dapat

dilihat bahwa PDRB Kota Tarakan juga selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 s.d tahun 2019.

Struktur Ketenagakerjaan Kota Tarakan menurut BPS Kota Tarakan, 2020

Tabel 3.2.1 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Tarakan, 2017-2019
Table Employment Indicators in Tarakan Municipality, 2017-2019

Indikator Indicator	Satuan Unit	Tahun Years		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Penduduk Usia Kerja)/ Population Aged 15 Years and Over (Working Age Population)	Orang/ Person	180 059	187 607	194 808
Angkatan Kerja/ Labor Force	Orang/ Person	119 169	116 959	125 702
Bekerja/ Working	Orang/ Person	112 508	110 012	119 694
Pengangguran/ Unemployment	Orang/ Person	6 661	6 947	6 008
Bukan Angkatan Kerja/ Not in Labor Force	Orang/ Person	60 890	70 648	69 106
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ Labor Force Participation Rate	Persen/ Percent	66,18	62,34	64,53
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/ Employment Opportunities Rate	Persen/ Percent	94,41	94,06	95,22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ Unemployment Rate	Persen/ Percent	5,59	5,94	4,78

Sumber/Source: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/August National Labor Force Survey

Sumber : BPS Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan di Kota Tarakan dapat digambarkan dalam masa tiga tahun (2017 s.d 2019) ini bahwa penyerapan tenaga kerja cukup baik dengan dijelaskan melalui tingkat kesempatan kerja yang meningkat dari dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 95,22 persen lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2018.

Sedangkan kalau dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tarakan, tingkat pengangguran pada tahun 2017 (5,59) dan tahun 2018 (5,94) lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 4,78 .

Pembahasan

Proses perencanaan ketenagakerjaan kota Tarakan melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dengan merujuk pada Visi-Misi dari Kota Tarakan, dimana : VISI, Mewujudkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan. MISI, Melaksanakan pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan, industri, perikanan dan pariwisata.

1. Meningkatkan dan mengembang kualitas sumberdaya manusia.
2. Melaksanakan peningkatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

3. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup.

Maka berdasarkan hal di atas dapat kita lakukan dengan :

Penyelidikan

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Penyelidikan di sini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi berkaitan dengan proses penyelidikan perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan.

Berkaitan dengan proses untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif dengan melihat suatu proses perencanaan sama dengan tahap pengumpulan data atau informasi. Hal senada oleh pendapat Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan

menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan, Bendavid-val menambahkan bahwa beberapa hasil utama pengumpulan data dan analisis data adalah mencakup evaluasi siklus perencanaan sebelumnya dan kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh menurut Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugoroho D (2007:42-43) menjelaskan unsur-unsur pokok dan siklus dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengumpulan informasi untuk perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan).

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyediaan ini menjadi faktor kunci karena masyarakat diajak untuk mengumpulkan, menggali dan mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. Dalam proses perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan, masyarakat diikutkan dari awal mulai dari tingkat masyarakat sampai dengan Pemerintah kota. Hal ini sesuai dengan pendapat Alexander Abe (2002;71) menjelaskan bahwa “ keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi.” Bahwa berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap

penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif dapat diketahui keterlibatan dalam mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali secara seksama masalah-masalah yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di kota Tarakan.

Analisis Masalah

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit.

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk

bersama-sama masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan kebutuhan dasar dari masyarakat yang antara lain kebutuhan lapangan pekerjaan.

Diana Conyers (1994;154) memberikan 3 (tiga) alasan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Berdasarkan identifikasi perencanaan ketenagakerjaan di kota Tarakan, permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu berasal dari :

1. Apa saja Potensi dan industri daerah yang mampu menopang ketersediaan kesempatan lapangan kerja di Kota Tarakan ?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dari segala aspek ?
3. Bagaimana Ketersediaan Kelembagaan ketenagakerjaan yang diharapkan mampu menopang peningkatan kinerja dari pencari pekerjaan?

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses identifikasi masalah dalam perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan senada dengan yang disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya,2001:25), lebih lanjut mengemukakan beberapa ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut : ” Terfokus pada kepentingan masyarakat (1).Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat (2) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.” kemudian hampir sama dengan apa yang dikatakan Samsura (2003;2) menjelaskan kriteria-

kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement)
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi

Hal senada juga disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi perencanaan, sebagai hasil utama dari pengumpulan dan analisis data, seyogyanya mencakup 5 bidang utama :

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.
2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut.
3. Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi

daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dsb)

4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah.
5. Perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumber daya, dan institusi, dsb.
6. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya

Kemudian dengan melihat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan partisipatif adalah Perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Mengenai stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan partisipatif hal yang sama dikemukakan Jenkins (dalam Wahab,1997:4) kebijakan publik adalah :

Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu

pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para kekuasaan dari para aktor tersebut).

Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah "...suatu yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya..."

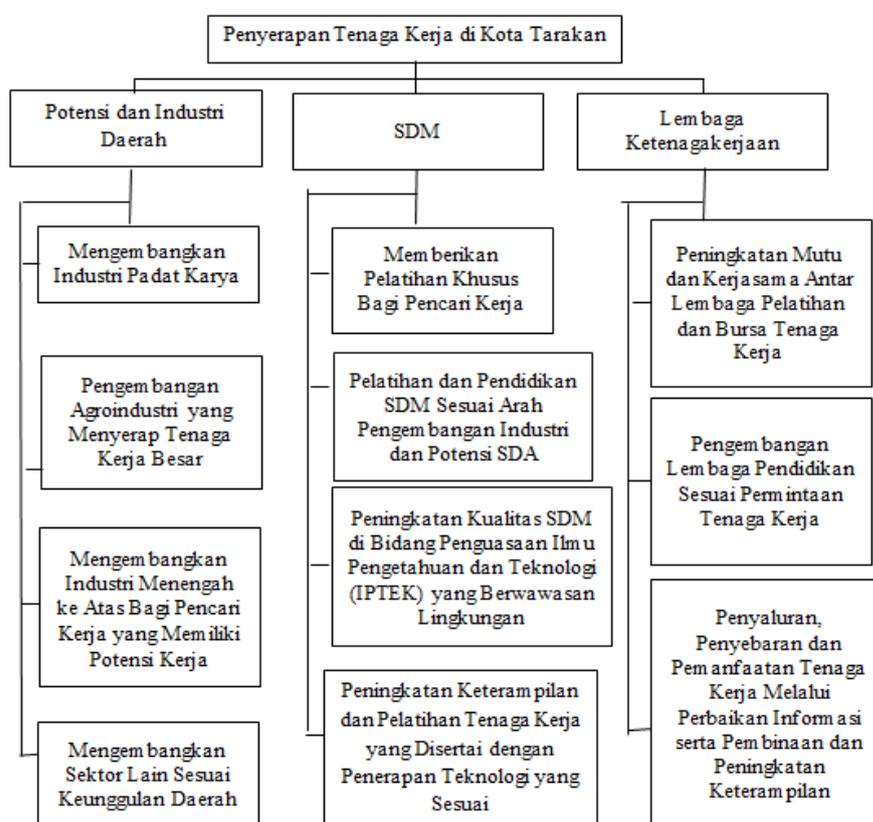
Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa membahas kebijakan publik khususnya Formulasi kebijakan publik berarti membicarakan aktor-aktor yang terlibat dan hubungan antar aktor untuk memecahkan masalah. Menurut Hudson (dalam Hadi,2005:26) bahwa perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Para penganut teori ini percaya bahwa melalui dialog, perencanaan dapat menjembatani teori dengan praktek untuk membawa perubahan sosial.

Analisis Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Mengenai perumusan tujuan perencanaan Bappeda kota Tarakan.

Berdasarkan dari sebab akibat yang ditemukan, maka perlu menentukan hubungan suatu

tindakan dengan hasil yang diharapkan dengan menentukan beberapa kegiatan yang merupakan keterwakilan dari setiap tindakan yang dilakukan. Dimana Kajian tujuan ini untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Dengan rangkaian seperti gambar dibawah ini :



Hal senada juga disampaikan Abe (2005) bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa prinsip-prinsip telah dilaksanakan agar perencanaan pembangunan benar-

benar berbasis rakyat, adapun prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparan, bahwa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat kelurahan

- sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat.).
2. Responsif, bahwa program pembangunan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena rancangan dari pihak-pihak tertentu saja.
 3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat.
 4. Akuntabel, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.
- diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kota Tarakan.
2. Responsif, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kota Tarakan
 3. Partisipatif, keterlibatan masyarakat Kota Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat
 4. Akuntabel, Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kota Tarakan dan hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dari tahap perumusan tujuan dalam perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan dapat diketahui dalam perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip :

1. Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat dinas/instansi, lembaga dan swasta terkait ketenagakerjaan sudah

Analisis Alternatif dan Peran

Dalam masalah ini daya dukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung yang dimaksudkan pada permasalahan ini bisa bermakna ganda: (1) daya dukung kongkrit, aktual, ada tersedia dan (2) daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan).

Pemahaman mengenai daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benar-benar merupakan hasil perhitungan yang masak.

Proses identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan yaitu dengan adanya musrembang Kota Tarakan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan adanya kesepakatan prioritas kegiatan sudah merupakan daya dukung dari masyarakat.

Dari pendapat narasumber tersebut bahwa daya dukung konkrit dan nyata adalah berupa uang bersumber pemerintah baik pemerintah daerah kabupaten, provinsi atau, kemudian daya dukung yang dapat diusahakan dengan melalui swadana masyarakat yang berupa uang, tenaga dsb. Hal senada juga disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi perencanaan Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dsb).

Kemudian Bratakusumah (2004) menjelaskan hal sama : Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan

yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang berdifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam pencapaian tujuannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan tahap identifikasi dukungan dalam proses perencanaan ketenagakerjaan di kota Tarakan dapat diketahui :

1. Dukungan kongkrit dan nyata adalah keikutsertaan masyarakat yang terbentuk dalam Tripartit di kota Tarakan.
2. Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa

dukungan konkrit dan nyata sudah ada dahulu.

3. Dukungan dari sektor formal dan informal serta dukungan dari masyarakat yang terdapat di kota Tarakan.

SIMPULAN

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses identifikasi masalah dalam perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan senada dengan yang disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya,2001:25), lebih lanjut mengemukakan beberapa ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut: ” Terfokus pada kepentingan masyarakat (1) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat (2) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.”

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan dari tahap perumusan

tujuan dalam perencanaan ketenagakerjaan di Kota Tarakan dapat diketahui dalam perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip : Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat dinas/instansi, lembaga dan swasta terkait ketenagakerjaan sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat Kota Tarakan. Responsif, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat Kota Tarakan. Partisipatif, keterlibatan masyarakat Kota Tarakan menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat. Akuntabel, Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat Kota Tarakan dan hasilnya hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui beberapa daya dukung sesuai analisis peran yang ada yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, Dukungan kongkrit dan nyata adalah keikutsertaan masyarakat yang terbentuk dalam Tripartit di kota Tarakan. Kedua, Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan konkrit dan nyata sudah ada

dahulu. Ketiga, Dukungan dari sektor formal dan informal serta dukungan dari masyarakat yang terdapat di kota Tarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. *Perencanaan daerah partisipatif*. pondok edukasi, Solo
- Adi, W. 2003. *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*. P2E-LIPI.: Jakarta
- Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, cetakan ketiga. Gajah Mada University Press.
- Jhingan, M.L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro. M. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- BPS Kota Tarakan. 2020. KOTA TARAKAN DALAM ANGKA TARAKAN MUNICIPALITY IN FIGURES. CV Kreasi Cahaya Abadi. Tarakan.
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riyadi & Bratakusumah, D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. PT Gramedia Pustaka utama Jakarta.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional wilayah Indonesia bagian barat*. Prisma
- Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, S. 1985. *Makroekonomi Modern*. Edisi 1, Cetakan 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* Edisi kesembilan Jilid 1. Devri Barnadi, dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1622/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Wrihatnolo, R.R, & Nugroho R.D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.